Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora
Volume 7, Nomor 4, Oktober 2026
e-ISSN: 2964-5468; p-ISSN: 2964-5484, Hal. 229-244
DOI: https://doi.org/10.59059/tabsyir.v7i4.3655
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir

Model Pemberdayaan Kelompok Peduli Mangrove: Transformasi Kapasitas dari Aksi Sukarela ke Pengelolaan Berkelanjutan di Pesisir Bandar Lampung

Mangrove Care Group Empowerment Model: Capacity Transformation from Voluntary Action to Sustainable Management on the Coast of Bandar Lampung

Ahmad Amri[1*], Faizal[2], Sri Ilham Nasution[3], Muhammad Mawardi J[4]
[1-4]Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: ahmad.amrizaki@gmail.com[1], faizal@radenintan.ac.id[2], sriilhamnasution@radenintan.ac.id[3], m.mawardij@radenintan.ac.id[4]

**Penulis Korespondensi: ahmad.amrizaki@gmail.com*

Abstract*. The conservation of mangrove forests in coastal areas faces challenges in the form of ecosystem pressures and limited community capacity for their management. In Kota Karang Village, Telukbetung Timur Subdistrict, Bandar Lampung City, the mangrove area in 2025 was recorded at 6.8 hectares based on data collected by Mitra Bentala. This situation highlights the importance of community empowerment to promote sustainable mangrove management. This study aims to analyze the empowerment process of the Mangrove Care Group and formulate an empowerment model for mangrove conservation along the coast of Bandar Lampung City. The study employs a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions and verification. The analysis utilized Jim Ife's theory of empowerment and community development, supported by concepts of participation, community-based mangrove management, and the perspective of Islamic Community Development. The results of the study indicate that empowerment occurs through seven stages: awareness-raising, organizing, capacity and skill building, participation in conservation, institutional strengthening, network and partnership building, and the development of group autonomy. This process is supported by cooperation and guidance from various parties but faces constraints related to limited capacity, resources, participation, and the sustainability of support.*

Keywords: *Bandar Lampung; Capacity Transformation; Community Empowerment; Mangrove Care Group; Sustainable Management.*

Abstrak. Pelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir menghadapi tantangan berupa tekanan ekosistem dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam pengelolaannya. Di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, luas mangrove pada 2025 tercatat 6,8 hektare berdasarkan pendataan Mitra Bentala. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pengelolaan mangrove berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberdayaan Kelompok Peduli Mangrove dan merumuskan model pemberdayaan dalam pelestarian mangrove di pesisir Kota Bandar Lampung. Penelitian menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis menggunakan teori pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Jim Ife, didukung konsep partisipasi, pengelolaan mangrove berbasis masyarakat, dan perspektif Pengembangan Masyarakat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berlangsung melalui tujuh tahapan, yaitu penyadaran, pengorganisasian, peningkatan kapasitas dan keterampilan, partisipasi pelestarian, penguatan kelembagaan, pembangunan jejaring dan kemitraan, serta pengembangan kemandirian kelompok. Proses tersebut didukung kerja sama dan pendampingan berbagai pihak, tetapi menghadapi kendala keterbatasan kapasitas, sumber daya, partisipasi, dan keberlanjutan dukungan. Penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat berperan sebagai subjek dalam mengenali masalah, mengembangkan kapasitas, melaksanakan tindakan kolektif, dan menjaga keberlanjutan mangrove. Kebaruan penelitian terletak pada model integratif yang menghubungkan ketujuh tahapan pemberdayaan sebagai satu kesatuan proses pelestarian mangrove berbasis masyarakat dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam.

Kata kunci: Bandar Lampung; Kelompok Peduli Mangrove; Pemberdayaan Masyarakat; Pengelolaan Berkelanjutan; Transformasi Kapasitas.

Naskah Masuk: 26 Agustus 2026; Revisi: 15 September 2026; Diterima: 25 Oktober 2026; Terbit: 30 Oktober 2026

1. PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir (Pirna & Saputra, 2026; Situmorang et al., 2025). Secara ekologis, mangrove berperan sebagai habitat dan tempat berkembang biak berbagai jenis biota laut, menjaga kestabilan garis pantai, mengurangi dampak gelombang, serta menyimpan karbon dalam jumlah besar (Alif et al., 2026). Kemampuan mangrove dalam menyimpan karbon menjadikannya salah satu ekosistem penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim (Alongi, 2014; Uly et al., 2025). Selain itu, keberadaan mangrove juga memiliki nilai sosial ekonomi karena mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir melalui ketersediaan sumber daya perikanan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta peluang pengembangan ekowisata dan usaha berbasis sumber daya lokal (Datta et al., 2012; Kertati et al., 2025). Dengan demikian, kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir.

Dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30. Tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan larangan melakukan kerusakan di darat dan di laut sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 41. Kedua ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan dan kemaslahatan kehidupan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian mangrove tidak hanya dapat dipahami sebagai tindakan ekologis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keagamaan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat menjadi penting karena keberlanjutan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perilaku, kesadaran, dan tanggung jawab manusia sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan alam.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki ekosistem mangrove dengan luas mencapai 3.364.080 hektare berdasarkan pemutakhiran Peta Mangrove Nasional tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.121.240 hektare atau 92,78% termasuk dalam kategori mangrove lebat, sedangkan sisanya berada dalam kategori sedang dan jarang (KLHK, 2021). Data tersebut menunjukkan besarnya potensi ekosistem mangrove Indonesia dalam mendukung keseimbangan lingkungan pesisir. Namun, keberadaan ekosistem ini tetap menghadapi berbagai tekanan, antara lain alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri, perluasan tambak, pembangunan infrastruktur pesisir, pencemaran, serta pemanfaatan mangrove yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Ancaman tersebut menjadi

perhatian dalam agenda pengelolaan mangrove nasional karena kerusakan ekosistem dapat mengurangi fungsi perlindungan pantai, keanekaragaman hayati, dan penyimpanan karbon (KLHK, 2021; Datta et al., 2012).

Tekanan terhadap ekosistem mangrove juga terjadi di Provinsi Lampung. Aktivitas pertambakan udang dan ikan, perubahan penggunaan lahan, serta pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir telah menjadi faktor yang memengaruhi keberadaan mangrove. Pemberitaan Mongabay Indonesia (2016) mengenai kondisi mangrove di Lampung menunjukkan adanya kerusakan yang berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan kawasan pesisir. Kerusakan tersebut perlu mendapat perhatian karena mangrove memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan sumber daya perikanan yang dimanfaatkan masyarakat. Ketika habitat mangrove mengalami penurunan kualitas dan luasan, fungsi ekologisnya sebagai tempat berlindung dan berkembang biak biota laut juga dapat terganggu. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber daya perikanan dan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir (Alongi, 2014; Datta et al., 2012).

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian mangrove tidak cukup dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi yang hanya berorientasi pada kegiatan penanaman bibit. Penanaman merupakan salah satu bagian dari rehabilitasi, tetapi keberhasilannya juga ditentukan oleh kesesuaian kondisi lingkungan, pemeliharaan, pemantauan, dan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang. Penelitian di sejumlah wilayah pesisir Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan tingkat keberhasilan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat dipengaruhi oleh bentuk partisipasi, dukungan kelembagaan, pendampingan eksternal, strategi pemeliharaan, dan pemantauan kawasan (Damastuti & de Groot, 2019; Damastuti et al., 2022). Datta et al. (2012) juga menegaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian manfaat, serta penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, kegiatan penanaman perlu disertai proses pemberdayaan yang membangun kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan mengawasi kegiatan pelestarian secara berkelanjutan.

Gambaran kondisi mangrove di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan perhatian lebih lanjut. Berdasarkan data Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung yang diberitakan RRI, luas mangrove eksisting di Provinsi Lampung mencapai 10.086,46 hektare, dengan potensi habitat mangrove tambahan sekitar 455 hektare. Sebaran mangrove terbesar berada di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pesawaran, dan Lampung Selatan. Sementara

itu, Kota Bandar Lampung tercatat memiliki luasan mangrove paling kecil dibandingkan wilayah kabupaten pesisir lainnya. Kondisi ini berkaitan dengan tingginya tekanan perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman, kawasan industri, dan pelabuhan (RRI, 2026). Data tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan mangrove di Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan yang lebih serius karena kawasan yang tersisa relatif terbatas dan berada di tengah perkembangan aktivitas perkotaan.

Salah satu kawasan mangrove yang masih tersisa di Kota Bandar Lampung berada di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Telukbetung Timur. Berdasarkan pendataan Mitra Bentala tahun 2025 yang diberitakan RRI, kawasan pesisir Kota Karang memiliki potensi mangrove seluas 6,8 hektare, tetapi tegakan mangrove yang masih ada hanya sekitar 1,3 hektare (RRI, 2026). Perbedaan antara potensi kawasan dan luas tegakan yang tersisa tersebut menunjukkan adanya ruang kawasan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi. Kondisi ini juga memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian Kurnia dan Hasanah (2016), yang menunjukkan perubahan luas mangrove di Kota Bandar Lampung dari 59,35 hektare pada 1993 menjadi 14 hektare pada 2015 dan sekitar 6 hektare pada 2016. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kota Bandar Lampung mengalami kehilangan sekitar 53,35 hektare atau 90,14% dari luas mangrove tahun 1993. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa pada 2016 kawasan mangrove yang tersisa terkonsentrasi di Kelurahan Kota Karang. Data tersebut memperlihatkan bahwa penyusutan mangrove di Kota Bandar Lampung bukan persoalan baru, melainkan masalah ekologis yang berlangsung dalam rentang waktu panjang dan membutuhkan upaya pelestarian yang konsisten.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting untuk memperkuat pelestarian mangrove. Pemberdayaan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman, tetapi juga membangun kemampuan mereka dalam mengenali permasalahan, menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta mempertahankan kegiatan secara mandiri. Jim Ife (2016) menjelaskan pengembangan masyarakat melalui prinsip keadilan sosial, tanggung jawab ekologis, dan penguatan praktik masyarakat. Kerangka tersebut relevan untuk memahami bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat dari program pelestarian, melainkan subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Sejalan dengan itu, pengelolaan mangrove berbasis masyarakat menempatkan partisipasi dan penguatan kelembagaan sebagai unsur penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem (Datta et al., 2012). Oleh karena itu, pemberdayaan perlu

diarahkan pada proses yang berkelanjutan, mulai dari penyadaran, pengorganisasian, peningkatan kapasitas, penguatan partisipasi, hingga terbentuknya kemandirian kelompok.

Dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian mangrove juga dapat dipahami sebagai implementasi dakwah bil hal, yaitu penyampaian nilai-nilai Islam melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip ishlah atau perbaikan kondisi sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab menjaga kemaslahatan kehidupan. Dengan demikian, kegiatan pelestarian mangrove tidak hanya diarahkan pada pemulihan ekosistem, tetapi juga pada pembentukan kesadaran kolektif, tanggung jawab sosial, kerja sama, dan kemandirian masyarakat. Kelompok masyarakat yang terorganisasi memiliki posisi strategis karena dapat menjadi ruang belajar, koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tindakan bersama dalam menjaga lingkungan pesisir.

Meskipun demikian, pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pelestarian mangrove tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hasil penelitian Alfandi, Qurniati, dan Febryano (2019) mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menunjukkan bahwa partisipasi kelompok masyarakat masih berada pada tingkat partisipasi terapeutik dan bersifat pasif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan mangrove belum selalu disertai dengan peran yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, penelitian Damastuti et al. (2022) memperlihatkan pentingnya pemeliharaan jangka panjang dan dukungan terhadap penghidupan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan mangrove berbasis masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelompok atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman belum secara otomatis mencerminkan terbentuknya kapasitas kelembagaan dan kemandirian dalam pengelolaan mangrove.

Di sisi lain, peluang penguatan kelompok masyarakat dapat dibangun melalui kolaborasi dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya. Di Provinsi Lampung, Mitra Bentala mendorong perlindungan mangrove melalui penguatan kebijakan di tingkat desa, termasuk penyusunan peraturan desa sebagai instrumen perlindungan ekosistem pesisir (RRI, 2026). Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam mengintegrasikan perlindungan mangrove ke dalam perencanaan pembangunan dan pemulihan kawasan pesisir yang mengalami kerusakan. Kolaborasi lintas pihak tersebut dapat membuka akses kelompok terhadap pengetahuan, keterampilan teknis, pendampingan, sumber daya, dan jejaring kemitraan. Namun, kerja sama tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan kelompok, bukan menjadikan kelompok terus-menerus bergantung pada bantuan

pihak luar. Hal ini sejalan dengan Datta et al. (2012), yang menempatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan penguatan kelembagaan sebagai unsur penting bagi keberlanjutan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat.

Salah satu kelompok yang berupaya menjalankan peran tersebut adalah Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang (KPMKK) di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung. Kelompok ini terbentuk pada pertengahan 2025 melalui inisiatif masyarakat dengan pendampingan lembaga swadaya masyarakat Mitra Bentala. Kehadirannya menjadi penting karena upaya pelestarian mangrove di Kota Karang tidak hanya menghadapi persoalan keterbatasan kawasan, tetapi juga membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan. Kegiatan kelompok mencakup pemetaan kawasan pesisir, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, penyulaman bibit yang rusak atau mati, pemantauan, serta pembersihan sampah di sekitar kawasan mangrove. Kelompok juga menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, antara lain Mitra Bentala, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, komunitas lingkungan, dan Bank Sampah Kota Karang. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya ruang kolaborasi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas dan penguatan kegiatan pelestarian.

Keberadaan KPMKK menarik untuk dikaji karena perannya tidak hanya terlihat dalam kegiatan penanaman, tetapi juga dalam proses pemeliharaan dan pendampingan kegiatan pelestarian. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat ketika anggota kelompok turut mendampingi mahasiswa Universitas Lampung dalam kegiatan penanaman mangrove melalui program Bakau Berdaya pada 17 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, anggota kelompok berperan sebagai fasilitator dan memberikan arahan teknis berdasarkan pengalaman mereka di lapangan. Peran ini menunjukkan adanya perkembangan kapasitas lokal, yaitu masyarakat tidak hanya terlibat sebagai peserta kegiatan, tetapi mulai mengambil peran dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada pihak lain. Meskipun demikian, perkembangan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana kapasitas kelompok telah terbentuk, bagaimana kelembagaannya dijalankan, serta apakah kegiatan yang dilakukan telah mengarah pada kemandirian kelompok.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa aspek yang telah banyak dibahas, antara lain perubahan luasan dan karakteristik ekosistem mangrove (Kurnia & Hasanah, 2016), tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove (Alfandi et al., 2019), pemetaan jasa ekosistem secara partisipatif (Damastuti & de Groot, 2019), serta efektivitas pengelolaan mangrove berbasis masyarakat dalam mendukung konservasi dan

penghidupan lokal (Damastuti et al., 2022; Datta et al., 2012). Kajian-kajian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami kondisi ekologis dan peran masyarakat dalam pengelolaan mangrove. Namun, berdasarkan literatur yang digunakan dalam penelitian ini, masih diperlukan kajian yang secara khusus menelusuri proses pemberdayaan kelompok secara utuh, mulai dari penyadaran hingga kemandirian, dengan memperhatikan hubungan antara peningkatan kapasitas individu, partisipasi kolektif, penguatan kelembagaan, dan jejaring kemitraan. Kebutuhan kajian tersebut semakin relevan dalam konteks pesisir perkotaan Kota Bandar Lampung yang memiliki kawasan mangrove terbatas dan menghadapi tekanan perubahan penggunaan lahan.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kelompok masyarakat dibentuk dan diberdayakan agar mampu menjalankan pelestarian mangrove secara berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya melihat keterlibatan kelompok dalam kegiatan penanaman, tetapi juga menganalisis proses pembentukan kesadaran, pengorganisasian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam kegiatan pelestarian, penguatan kelembagaan, pembangunan jejaring kemitraan, serta pengembangan kemandirian kelompok. Aspek-aspek tersebut dianalisis dengan menggunakan teori pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Jim Ife serta ditinjau melalui perspektif Pengembangan Masyarakat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemberdayaan Kelompok Peduli Mangrove dalam pelestarian hutan mangrove di pesisir Kota Bandar Lampung, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan model pemberdayaan yang dapat mendukung keberlanjutan pelestarian mangrove. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa model pemberdayaan kelompok yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pelestarian, sekaligus memberikan masukan praktis bagi kelompok masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendamping dalam memperkuat pengelolaan mangrove berbasis masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif untuk memahami proses pemberdayaan Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang (KPMKK) dalam pelestarian hutan mangrove. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, yang dipilih secara purposif karena memiliki potensi mangrove seluas 6,8 hektare dan menjadi lokasi berbagai kegiatan pelestarian oleh KPMKK. Data penelitian terdiri atas data primer yang

diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap ketua dan anggota kelompok, pendamping Mitra Bentala, perwakilan instansi atau lembaga mitra, serta tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 11 informan, dan data sekunder yang bersumber dari dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, dokumentasi, buku, jurnal, serta dokumen pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis menggunakan perspektif pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Jim Ife, didukung konsep partisipasi masyarakat, pengelolaan mangrove berbasis masyarakat, dan perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, dengan fokus pada tujuh aspek pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengorganisasian, peningkatan kapasitas dan keterampilan, partisipasi, penguatan kelembagaan, jejaring dan kemitraan, serta kemandirian kelompok. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification) untuk menjelaskan proses pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model pemberdayaan yang mendukung keberlanjutan pelestarian mangrove di pesisir Kota Bandar Lampung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang

Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang (KPMKK) merupakan kelompok swadaya masyarakat yang berada di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung. Kelompok ini terbentuk pada pertengahan tahun 2025 atas inisiatif masyarakat pesisir dengan pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala. Pembentukannya dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan lingkungan pesisir, seperti penebangan mangrove, alih fungsi lahan, penumpukan sampah plastik, serta ancaman abrasi dan banjir rob. Kawasan Kota Karang memiliki potensi mangrove sekitar 6,8 hektare. Luasan tersebut merupakan potensi kawasan dan tidak seluruhnya menunjukkan tutupan mangrove dalam kondisi baik. Oleh karena itu, pelestarian mangrove membutuhkan kegiatan rehabilitasi sekaligus pemeliharaan dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, KPMKK terlibat dalam berbagai kegiatan, meliputi pemetaan kawasan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, penyulaman bibit, pemantauan, dan pembersihan sampah pesisir. Kegiatan tersebut didukung melalui kerja sama dengan Mitra Bentala, pemerintah daerah, Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, komunitas

lingkungan, serta Bank Sampah Kota Karang (BASKORA). Keberadaan KPMKK menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelestarian mangrove. Peran kelompok tidak hanya terbatas pada kegiatan penanaman, tetapi juga mencakup pemeliharaan dan pemantauan kawasan. Meskipun demikian, kemampuan organisasi, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan kegiatan masih menjadi aspek penting untuk dikembangkan.

Proses Pemberdayaan Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang

Proses pemberdayaan KPMKK dalam pelestarian mangrove dapat dilihat melalui tujuh aspek, yaitu penyadaran masyarakat, pengorganisasian kelompok, peningkatan kapasitas dan keterampilan, partisipasi dalam kegiatan pelestarian, penguatan kelembagaan, jejaring dan kemitraan, serta pengembangan kemandirian kelompok.

Penyadaran Masyarakat

Penyadaran masyarakat dilakukan melalui pengenalan terhadap kondisi dan permasalahan lingkungan pesisir Kota Karang, seperti penebangan mangrove, penumpukan sampah plastik, serta ancaman abrasi dan banjir rob. Proses ini diperkuat melalui pendampingan Mitra Bentala dan kegiatan edukasi lingkungan yang mendorong masyarakat memahami pentingnya menjaga ekosistem mangrove.

Pemahaman masyarakat juga diarahkan pada pentingnya pemeliharaan setelah penanaman. Rehabilitasi mangrove tidak cukup dilakukan dengan menanam bibit, tetapi harus disertai perawatan, pemantauan pertumbuhan, dan penggantian bibit yang mati atau rusak. Dengan demikian, penyadaran menjadi dasar bagi tumbuhnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian mangrove.

Pengorganisasian Kelompok

Pengorganisasian masyarakat diwujudkan melalui pembentukan KPMKK pada pertengahan tahun 2025 dengan pendampingan Mitra Bentala. Pembentukan kelompok menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengoordinasikan kegiatan dan membangun tanggung jawab bersama dalam pelestarian mangrove. Melalui kelompok, masyarakat terlibat dalam pemetaan kawasan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemantauan, dan pembersihan sampah. Namun, pengorganisasian masih perlu diperkuat melalui pembagian tugas, administrasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan regenerasi kepemimpinan agar kegiatan tidak bergantung pada beberapa anggota atau pendamping eksternal.

Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan

Peningkatan kapasitas anggota dilakukan melalui pendampingan teknis dan kerja sama dengan berbagai lembaga. Kegiatan tersebut meliputi pemetaan kawasan pesisir menggunakan metode floating, pengelolaan rumah pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan mangrove. Keterlibatan anggota dalam kegiatan lapangan memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Dukungan perguruan tinggi, termasuk ITERA melalui pengembangan rumah pembibitan, turut membuka ruang pembelajaran bagi kelompok. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas perlu dilihat dari kemampuan anggota menerapkan keterampilan secara konsisten dan menjalankan kegiatan tanpa selalu bergantung pada pendamping.

Partisipasi dalam Kegiatan Pelestarian

Partisipasi anggota KPMKK terlihat melalui keterlibatan dalam pemetaan kawasan, penanaman, pemeliharaan, penyulaman bibit, pemantauan, dan pembersihan sampah pesisir. Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dua kali dalam sebulan, meliputi pemeriksaan kondisi tanaman, penggantian bibit yang mati atau rusak, perbaikan ajir, dan pembersihan sampah. Keterlibatan kelompok juga terlihat dalam penanaman 1.000 bibit mangrove pada 25-26 Juli 2025 dan 1.600 bibit Avicennia marina bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung pada 24 Oktober 2025. Jumlah bibit yang ditanam tersebut merupakan capaian kegiatan, tetapi belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan ekologis tanpa data kelangsungan hidup tanaman.

Selain itu, anggota KPMKK turut berperan sebagai pemandu teknis bagi mahasiswa Universitas Lampung dalam kegiatan Bakau Berdaya pada 17 Mei 2026. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa pengalaman anggota mulai dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pihak lain. Namun, partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kelompok masih perlu ditelusuri lebih lanjut.



Gambar 1. Suasana penanaman hutan mangrove bersama mahasiswa, anggota KPMKK dan Masyarakat.

Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan KPMKK dilakukan melalui pendampingan, koordinasi kegiatan, pemantauan kawasan, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kegiatan pemantauan memberikan pengalaman kepada anggota dalam mengamati kondisi mangrove, mengenali permasalahan pertumbuhan, dan menentukan kebutuhan pemeliharaan. Namun, penguatan kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lapangan. Kelompok juga perlu memiliki pembagian tugas yang jelas, administrasi yang tertib, pertemuan rutin, pengelolaan keuangan, dan mekanisme evaluasi. Penguatan aspek tersebut diperlukan agar KPMKK mampu mengelola organisasi dan mempertahankan kegiatan pelestarian secara berkelanjutan.

Jejaring dan Kemitraan

KPMKK membangun jejaring dengan Mitra Bentala, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Universitas Lampung, ITERA, komunitas lingkungan, dan BASKORA. Kerja sama tersebut mendukung kegiatan pendampingan, rehabilitasi, peningkatan kapasitas teknis, edukasi lingkungan, dan pengelolaan sampah pesisir. Jejaring tersebut menjadi salah satu sumber dukungan bagi pengembangan kelompok. Namun, keberhasilan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya lembaga yang terlibat, tetapi juga oleh kemampuan kelompok menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas, dan berperan aktif dalam pelaksanaan kerja sama. Oleh karena itu, kemitraan perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelompok, bukan menciptakan ketergantungan terhadap pihak luar.



Gambar 2. Suasan Penyuluan, Pelatihan, Penanaman Mangrove Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengembangan Kemandirian Kelompok

Pengembangan kemandirian KPMKK diarahkan melalui pengelolaan rumah pembibitan dan pemanfaatan potensi ekonomi kawasan pesisir. Rumah pembibitan berpotensi menjadi sarana penyediaan bibit sekaligus tempat pembelajaran bagi anggota kelompok. Selain itu, terdapat gagasan pengembangan wisata edukatif mangrove di sekitar jembatan menuju

Pulau Pasaran, yang berpotensi membuka peluang ekonomi melalui jasa pemandu, penyewaan perahu, kuliner, dan produk kreatif masyarakat. Kerja sama dengan BASKORA juga membuka peluang pengembangan pengelolaan sampah plastik. Namun, gagasan tersebut perlu dibedakan dari kegiatan ekonomi yang telah berjalan. Berdasarkan bahan penelitian, pengembangan wisata edukatif dan usaha berbasis mangrove masih berupa potensi atau rencana. Oleh karena itu, kemandirian kelompok masih perlu dikembangkan, terutama dalam pengelolaan organisasi, pendanaan, usaha kelompok, dan keberlanjutan kegiatan pemeliharaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan KPMKK

Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang mendukung proses pemberdayaan KPMKK. Pertama, kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan pesisir menjadi dasar terbentuknya kegiatan kolektif. Kedua, pendampingan Mitra Bentala membantu proses pengorganisasian, edukasi, dan pelaksanaan kegiatan pelestarian. Ketiga, dukungan pemerintah dan perguruan tinggi memberikan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, serta kegiatan rehabilitasi. Keempat, pengalaman anggota dalam pemetaan, penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan menjadi modal penting bagi pengembangan keterampilan kelompok. Kelima, jejaring dengan berbagai lembaga dan komunitas memperluas peluang kerja sama serta dukungan terhadap kegiatan pelestarian mangrove.

Faktor Penghambat dan Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan KPMKK meliputi beberapa aspek. Pertama, tekanan ekologis kawasan pesisir, seperti sampah plastik, penebangan, dan kerusakan bibit akibat kondisi lingkungan. Kedua, kebutuhan penguatan tata kelola kelompok, terutama dalam pembagian tugas, administrasi, pengambilan keputusan, dan regenerasi kepemimpinan. Ketiga, keberlanjutan pendampingan dan kemitraan perlu diperhatikan agar kegiatan tidak bergantung sepenuhnya pada program pihak luar. Keempat, pengembangan sumber pendanaan dan kegiatan ekonomi masih membutuhkan perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, serta sarana pendukung. Kelima, konsistensi partisipasi anggota perlu dijaga karena pelestarian mangrove membutuhkan keterlibatan masyarakat secara terus-menerus.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pelestarian mangrove tidak hanya ditentukan oleh kegiatan penanaman, tetapi juga oleh kapasitas anggota, tata kelola organisasi, kemitraan, kondisi lingkungan, dan kemampuan kelompok mengelola sumber daya.

Model Pemberdayaan Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang

Berdasarkan hasil penelitian, model pemberdayaan KPMKK dapat dirumuskan melalui tujuh aspek yang saling berkaitan, yaitu penyadaran, pengorganisasian, peningkatan kapasitas dan keterampilan, partisipasi dalam kegiatan pelestarian, penguatan kelembagaan, jejaring dan kemitraan, serta pengembangan kemandirian kelompok. Penyadaran menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami permasalahan dan pentingnya pelestarian mangrove. Kesadaran tersebut kemudian diwujudkan melalui pengorganisasian dalam kelompok agar kegiatan dapat dilakukan secara kolektif. Setelah kelompok terbentuk, peningkatan kapasitas diperlukan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan anggota dalam menjalankan kegiatan pelestarian.

Keterampilan yang dimiliki selanjutnya diterapkan melalui partisipasi dalam pemetaan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan. Agar kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan, diperlukan penguatan kelembagaan melalui tata kelola organisasi, pembagian tugas, administrasi, dan evaluasi. Selanjutnya, jejaring dan kemitraan dikembangkan untuk memperluas akses terhadap pengetahuan, sumber daya, dan dukungan berbagai pihak. Seluruh proses tersebut diarahkan pada pengembangan kemandirian kelompok, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan, merencanakan kegiatan, mengelola sumber daya, membangun pendanaan, dan mempertahankan pelestarian mangrove secara berkelanjutan. Dengan demikian, model pemberdayaan KPMKK menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pelestarian, sedangkan lembaga pendamping, pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas berperan sebagai mitra pendukung.

Ketujuh aspek tersebut tidak selalu berlangsung secara berurutan, tetapi dapat saling memengaruhi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kelompok. Oleh karena itu, model pemberdayaan ini perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan kelompok, kemitraan, dan keberlanjutan pelestarian mangrove.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang (KPMKK) dalam pelestarian hutan mangrove di pesisir Kota Bandar Lampung berlangsung melalui tujuh aspek, yaitu penyadaran masyarakat, pengorganisasian kelompok, peningkatan kapasitas dan keterampilan, partisipasi dalam kegiatan pelestarian, penguatan kelembagaan, jejaring dan kemitraan, serta pengembangan kemandirian kelompok. Proses tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti pemetaan kawasan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemantauan mangrove, dan pengelolaan sampah pesisir. Keterlibatan anggota

juga mulai berkembang, tidak hanya sebagai peserta kegiatan, tetapi turut berperan dalam pemantauan dan pendampingan teknis kepada pihak lain.

Pelaksanaan pemberdayaan didukung oleh kepedulian masyarakat, pendampingan Mitra Bentala, dukungan pemerintah dan perguruan tinggi, serta jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama penguatan tata kelola organisasi, konsistensi partisipasi anggota, keberlanjutan kemitraan, tekanan ekologis kawasan pesisir, dan keterbatasan pengembangan sumber pendanaan kelompok. Selain itu, rencana pengembangan rumah pembibitan dan wisata edukatif mangrove masih memerlukan pengelolaan lebih lanjut agar dapat mendukung kemandirian kelompok.

Dengan demikian, model pemberdayaan KPMKK perlu dikembangkan secara terpadu melalui penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, partisipasi, dan kemitraan yang berorientasi pada kemandirian. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai pelaku utama yang memiliki kemampuan untuk mengenali permasalahan, menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, dan mengelola kegiatan pelestarian. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan kelompok mempertahankan pemeliharaan mangrove, mengelola organisasi, dan melanjutkan kegiatan secara berkelanjutan.

REFERENSI

Alfandi, D., Qurniati, R., & Febryano, I. G. (2019). Community participation in mangrove management. *Jurnal Sylva Lestari, 7*(1), 30–41. https://doi.org/10.23960/jsl1730-41

Alif, M., Yuliani, F., & Zulkarnaini. (2026). Evaluasi kebijakan perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di Kampung Kayu Ara Permai Kabupaten Siak. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4*(1), 272–285. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2476

Damastuti, E., & de Groot, R. (2017). Effectiveness of community-based mangrove management for sustainable resource use and livelihood support: A case study of four villages in Central Java, Indonesia. *Journal of Environmental Management, 203*, 510–521. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.07.025

Damastuti, E., & de Groot, R. (2019). Participatory ecosystem service mapping to enhance community-based mangrove rehabilitation and management in Demak, Indonesia. *Regional Environmental Change, 19*(1), 65–78. https://doi.org/10.1007/s10113-018-1378-7

Damastuti, E., de Groot, R., Debrot, A. O., & Silvius, M. J. (2022). Effectiveness of community-based mangrove management for biodiversity conservation: A case study from Central Java, Indonesia. *Trees, Forests and People, 7*, Article 100202. https://doi.org/10.1016/j.tfp.2022.100202

Damastuti, E., van Wesenbeeck, B. K., Leemans, R., de Groot, R. S., & Silvius, M. J. (2023). Effectiveness of community-based mangrove management for coastal protection: A case study from Central Java, Indonesia. *Ocean & Coastal Management, 238*, Article 106498. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106498

Datta, D., Chattopadhyay, R. N., & Guha, P. (2012). Community based mangrove management: A review on status and sustainability. *Journal of Environmental Management, 107*, 84–95. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.04.013

Fitriadi, Gunawan, T., & Rijanta. (2005). Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove: Kasus di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Manusia dan Lingkungan, 12*(3), 122–129. https://doi.org/10.22146/jml.18640

Handal Online. (2025, Juli 27). *Peringati Hari Mangrove se-Dunia, Mitra Bentala bersama GPAP tanam 1000 bibit*. https://handalonline.com/2025/07/27/peringati-hari-mangrove-se-dunia-mitra-bentala-bersama-gpap-tanam-1000-bibit/

Institut Teknologi Sumatera. (2026, Juni 17). *Kampus berdampak: Dosen ITERA perkuat pemberdayaan masyarakat melalui rumah pembibitan mangrove*. https://www.itera.ac.id/en/kampus-berdampak-dosen-itera-perkuat-pemberdayaan-masyarakat-melalui-rumah-pembibitan-mangrove/

Kertati, I., Christine DW, Imbiri, S. Y., & Jadida, A. K. (2025). Sekolah perempuan dan hutan mangrove: Transformasi peran perempuan Waropen Papua dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Mimbar Administrasi, 22*(2). https://doi.org/10.56444/mia.v22i2.3240

Mitra Bentala. (2025a, Oktober 25). *Kelompok Mangrove Kota Karang dan DKP Kota Bandar Lampung kolaborasi tanam 1.600 bibit mangrove untuk pelestarian pesisir*. https://mitrabentala.or.id/kelompok-mangrove-kota-karang-dan-dkp-kota-bandar-lampung-kolaborasi-tanam-1-600-bibit-mangrove-untuk-pelestarian-pesisir/

Mitra Bentala. (2025b, Oktober 24). *Pastikan keberhasilan rehabilitasi pesisir, Kelompok Mangrove Kota Karang lakukan pemeliharaan rutin*. https://mitrabentala.or.id/pastikan-keberhasilan-rehabilitasi-pesisir-kelompok-mangrove-kota-karang-lakukan-pemeliharaan-rutin/

Mitra Bentala. (2025c, Oktober 17). *Perkuat gerakan pelestarian mangrove melalui sosialisasi dan kolaborasi lokal*. https://mitrabentala.or.id/perkuat-gerakan-pelestarian-mangrove-melalui-sosialisasi-dan-kolaborasi-lokal/

Mitra Bentala. (2025d, November 11). *Perkuat upaya pelestarian mangrove, Kelompok Peduli Mangrove Kota Karang laksanakan monitoring kedua*. https://mitrabentala.or.id/perkuat-upaya-pelestarian-mangrove-kelompok-peduli-mangrove-kota-karang-laksanakan-monitoring-kedua/

Pirna, E., & Saputra, T. (2026). Pengembangan wisata hutan mangrove di Kampung Kayu Ara Permai. *Journal of Administrative and Social Science, 7*(2), 56–73. https://doi.org/10.55606/jass.v7i2.2536

Radio Republik Indonesia. (2026, Juli 26). *Peringati Hari Mangrove se-Dunia, Mitra Bentala ajak masyarakat lindungi mangrove*. https://rri.co.id/bandar-lampung/regional/2598662/peringati-hari-mangrove-se-dunia-mitra-bentala-ajak-masyarakat-lindungi-mangrove

Situmorang, R., Warni, M. S., & Harefa, M. S. (2025). Potensi dan tantangan pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat pesisir di Desa Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu. *Botani: Publikasi Ilmu Tanaman dan Agribisnis, 2*(2), 209–218. https://doi.org/10.62951/botani.v2i2.346

Tobing, P. N., Nabilah, R., & Maulidyah, S. (2023). *Panduan pengelolaan mangrove di Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung*. ITERA Press.

Uly, A. I. M. Y., Benu, E. D. N. A., & Lopo, Y. H. L. (2025). Implementasi kebijakan tata kelola rehabilitas hutan mangrove di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 2*(4), 51–65. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.2453